

TAJUK RENCANA

Tak Perlu Ragu Tindak Al Zaytun

PEMERINTAH hendaknya tak ragu untuk menindak Ponpes Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang. Sebab, selain indikasi tindak pidananya sangat kuat, keberadaannya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi, ada dugaan Ponpes tersebut terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII). Kiranya yang disebut terakhir ini sangat serius karena terkait dengan keutuhan NKRI. Tak boleh ada negara dalam negara.

Kita menilai pemerintah agak lamban dalam menyikapi fenomena Al Zaytun, mudah-mudahan ini hanyalah sekedar tindakan kehati-hatian saja. Apalagi, setelah di muka publik Panji Gumilang émenantangi bahwa ajarannya tidak sesat bahkan mendapat dukungan dari pemerintah. Ia menyebut sejumlah nama pejabat maupun mantan pejabat negara yang mendukung keberadaan Ponpes Al Zaytun.

Tentu itu baru pernyataan sepihak dari Panji Gumilang yang mengklaim mendapat dukungan dari pemerintah. Bahwa ada tidaknya pejabat negara yang mendukung aktivitas dia, tentu masih harus dibuktikan di pengadilan nanti. Kita asumsikan bahwa Al Zaytun adalah Ponpes yang disalahgunakan oleh pendirinya. Secara kurikulum mungkin tak jauh berbeda dengan Ponpes pada umumnya, namun di balik itu ada program terselubung yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam.

Langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerjunkan tim untuk melakukan investigasi di Ponpes Al Zaytun sudah tepat, meski kemudian mendapat perlawanan dari Panji Gumilang. Karena ini menyangkut kepentingan publik, selayaknya diambil tindakan paksa agar investigasi bisa berjalan lancar. Salah satu caranya yakni dengan menersangkakan Panji Gumilang atas tuduhan penistaan agama.

Dengan statusnya sebagai

tersangka, maka yang bersangkutan tak lagi ada keleluasaan dalam mengelola Ponpes Al Zaytun. Selama Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, pemerintah dapat menunjuk pejabat sementara untuk mengelola Ponpes tersebut sejalan dengan aturan baku yang telah ditetapkan sebagaimana Ponpes pada umumnya. Dalam konteks itu, kita tetap mengedepankan kepentingan para santri yang selama ini belajar di tempat tersebut, jangan sampai mereka dirugikan dan tidak mendapat pendidikan dan pengajaran selayaknya.

Polri telah melayangkan tuduhan kepada Panji Gumilang melanggar Pasal 156a KUHP dan juga Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ketentuan yang disebut pertama menyangkut penodaan agama, sedang yang disebut terakhir menyangkut perbuatan yang menyebabkan keonaran atau keresahan di masyarakat.

Tak hanya itu, PPA TK juga telah memblokir 289 rekening Al Zaytun yang dinilai mencurigakan, termasuk 33 rekening atas nama institusi. Panji Gumilang diduga menggunakan enam identitas yang berbeda, antara lain Abu Toto Panji Gumilang, Abdussalam Panji Gumilang dan seterusnya. Dari sini saja mudah disimpulkan ada yang tidak beres dengan Ponpes Al Zaytun. Karenanya pemerintah tak perlu ragu untuk menindak Ponpes tersebut.

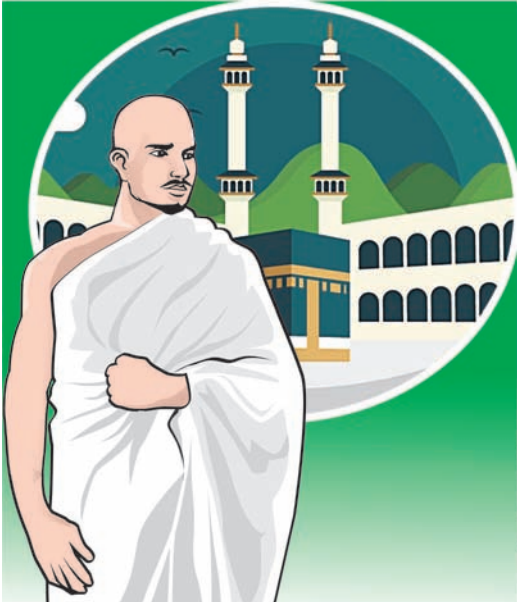
Soal beking-membeking, atau siapa di balik Al Zaytun serahkan pada aparat penegak hukum. Lebih penting lagi, selagi proses hukum berjalan, hendaknya tidak memberi akses kepada Panji Gumilang untuk berkampanye di ruang publik, termasuk di media, baik media mainstream maupun media sosial. □-d

Perlu Mitigasi Petugas Haji Siapkan Antisipasi

Isngadi Marwah Atmadja

Karena kebijakan berani ini diiringi dengan program ‘haji ramah lansia’. Semua petugas haji di musim haji kali ini didoktrin untuk peduli pada warga senior. Hasilnya juga terlihat secara nyata.

Banyak akun sosial media milik para petugas haji dibanjiri foto dan video mereka dalam melayani warga senior



KR-JOKO SANTOSO

ini. Mulai dari sekedar mendorong kursi roda, menggandeng, bahkan menggendong secara langsung warga senior yang membutuhkan bantuan fisik.

Namun, tiada gading yang tidak retak. Di antara gambar dan video yang viral tentang keheroikan para petugas melayani para warga senior, terselip kabar masalah klasik yang menjengkelkan tentang pelayanan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina kembali terulang. Banyak jamaah haji yang terpaksa berdesakan di mina juga kepanasan, kelaparan, dan kehausan saat di Muzdalifah. Alasannya sangat

Memaknai Bulan Bung Karno

Usep Setiawan

mu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Presiden Jokowi, Visi Indonesia 2045 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur dalam bingkai NKRI. Kita ingin Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa.

Kuatkan Trisakti

Visi Indonesia menuju 2045 harus menjadi konsensus nasional yang bersemangatkan Trisakti yang diajarkan Bung Karno. Presiden Jokowi memper-tajam Trisakti melalui Nawacita yang dijalankan melalui RPJM Nasional 2014-2024, RKP tahunan, dan proyek strategis nasional.

Presiden Jokowi menetapkan 7 poin ‘Impian Indonesia 2015-2085’: SDM Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Masyarakat dan aparat-ratur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Terbanggunya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Indonesia menjadi barom-

klise, kendaraan penjemput dan pangan-logistik terjebak macet. Kasus ini mungkin tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab kemenag RI. Pelayanan *armuzna* memang menjadi tanggung-jawab mashariq.

Mitigasi

Akan tetapi akan lebih sempurna kiranya kalau petugas haji Indonesia yang dibiayai APBN ini juga melakukan miti-gasi dengan menyiapkan beberapa langkah antisipasi. Apalagi kasus mashariq (dulu muassasah) yang tidak beres ini hampir selalu terjadi di setiap musim haji.

Ibarat perang zaman Pajang. Panglima, senapati, dan para prajurit yang menjadi petugas haji tahun ini terlihat sangat hebat dan mumpuni. Sayangnya ada celah antara prajurit dengan para senapatinya. Kita tidak melihat peran lurah prajurit, panatus, juga dan panewunya. Para prajurit hanya bisa bingung melihat kemacetan karena hanya tahu perintah untuk menggendong warga senior. Sedang para lurah, panatus, panewunya entah ke mana. Atau memang tidak ada.

Semoga kekurangan yang berulang ini dapat dibenahi di musim haji yang akan datang. Kita doakan semua jamaah haji tahun ini mendapat kemabruran dalam setiap ibadahnya. Demikian juga para petugasnya.

*) *Isngadi Marwah Atmadja MH, Anggota Perkumpulan Sastrawan Jawa Paramarta Bantul*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Perlu Penjelasan Langsung dari Bank BNI

BEBERAPA waktu lalu, saya menerima WA dari nomer: +62 857 6031 2802 pada pukul 14.43, lengkap dengan logo dan tulisan BNI di profil picturenya. Sekilas kemudian ada tulisan huruf kapital : BNI INFO... Ketika mau membuka terus terang ada rasa gamang, namun sebagai nasabah rasanya ingin membuka juga. Hanya saja saya ingat, pagi harinya baru menerima kiriman WA juga mengenai modus baru yang muncul dalam penipuan via WA. Tidak lagi dengan format Apk namun kini Pdf.

Saya mengontak beberapa teman yang saya tahu adalah juga nasabah BNI, bahkan sejak zaman bahuela, tahun 1980-an. Ketika saya tanya, dia mengata-

kan tidak menerima info tersebut. Bebereapa teman yang lain juga mengatakan tidak. Beberapa menyaranakan langsung *delete* saja. Saya sejatinya bermaksud bertanya ke BNI langsung, namun karena kebetulan hari libur membuat harus menunda. Tetapi setelah dua hari kemudian kiriman WA itu saya hapus. Khawatir kelupaan malah jadi membuka.

Apapun, tampaknya BNI juga perlu memberikan penjelasan lewat media. Saya kira bukan hanya saya yang mendapat kiriman tersebut. Mungkin akan lebih banyak lagi. Semoga saja BNI bersedia memberikan penjelasan. Terimakasih. □-d

Ninik, 08182xxxxx

SIU PP (Surat Izin Usaha Perbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisariss Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Samarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP